

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA JATIREJO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Indira Aprilia Salsabila, R. Slamet Santoso

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

The village tourism program is one of the government's strategies to address rural poverty by developing the potential and uniqueness of villages, providing support and accommodations to transform them into tourism products, thereby improving the welfare of the community. Jatirejo Village has been designated as a tourism village in Semarang City since 2017. However, Jatirejo is still classified as a pioneer tourism village, which poses a problem as the neighboring tourism villages have already achieved the status of developed tourism villages. This study aims to evaluate and analyze the implementation of the tourism village development program in Jatirejo and the factors hindering its implementation. This research uses a descriptive qualitative method, collecting data through interviews, observations, and literature studies. The evaluation criteria were based on Bridgman and Davis (2000). The findings show that the implementation of the Jatirejo tourism village has been optimal in terms of outcome indicators, but still lacks optimization in terms of input, process, and output indicators. The hindering factors were evaluated based on Darwin's (1999) criteria for program constraints. The research findings indicate that the interests and benefit principles are obstacles to the program's implementation, while the cultural indicator does not have an impact on its execution. Additionally, a significant hindering factor identified in the field is related to natural resource aspects. The recommendations resulting from this study are the need for a Jatirejo promotion system by collaborating with other tourist villages and participating in regional tourism events, Disbudpar needs to increase the intensity of monitoring and preparation of action plans, hold regular meetings within a certain time period and utilize the culture and arts in Jatirejo as tourism products to attract visitors.

Keywords : Implementation Evaluation, Jatirejo Tourism Village Development

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia termasuk dalam masalah krusial yang perlu diutamakan karena dampaknya yang sangat besar seperti pengangguran, angka

kematian dan ketimpangan sosial. Pada negara maju, masalah kemiskinan berkaitan dengan kualitas hidup serta pengembangan industri, namun di negara berkembang cenderung terkait pendapatan

yang tidak merata (Noorikhsan & Gunawan, 2022). Semarang menduduki tingkat tertinggi sebagai kota dengan persentase kemiskinan yang rendah. Kondisi ini menunjukkan kondisi Kota Semarang dimana hanya sebagian penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meski menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin terendah, namun masih ada ketimpangan antara masyarakat pendapatan tinggi dan masyarakat pendapatan rendah. Banyak kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat yang sama dari pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk miskin di Semarang tergolong tinggi dibandingkan kota besar lain di Jawa Tengah.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di 6 Kota Besar Provinsi Jawa Tengah 2015-2023

Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Magelang	10,90	10,60	10,60	9,60	9,10	9,60	9,44	8,65	7,45
Kota Surakarta	55,70	55,90	54,90	47,00	45,20	47,03	48,78	45,94	43,89
Kota Salatiga	10,60	9,70	9,60	9,20	9,20	9,69	10,14	9,45	9,41
Kota Semarang	84,30	83,60	80,90	73,60	72,00	79,58	84,45	79,87	80,53
Kota Pekalongan	24,10	23,60	22,50	20,50	20,20	22,16	84,45	79,87	80,53
Kota Tegal	20,30	20,30	20,10	19,40	18,60	19,55	20,27	19,78	19,22

Sumber : Diolah dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kota Semarang menduduki kota nomor satu dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Hal ini sangat disayangkan mengingat Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah sekaligus pusat

pemerintahan dan ekonomi (Nova et al., 2023) yang seharusnya memberikan manfaat kemudahan masyarakatnya dalam bekerja dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Menanggapi isu ini, Pemkot Semarang menggandeng seluruh stakeholder dalam pembentukan program desa wisata. Pembentukan desa wisata dilakukan dengan memanfaatkan potensi daya tarik wisata daerah baik alam, budaya maupun buatan manusia yang akan diberikan dukungan, akomodasi dan fasilitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan luar daerah (Ramadhan, 2023). Kota Semarang saat ini memiliki 7 desa wisata dengan beragam potensi yang berbeda.

Tabel 1.2

Desa Wisata di Kota Semarang

Kecamatan	Desa	Potensi Desa Wisata
Gunung Pati	Cepoko	Kebun Buah
Gunung Pati	Jatirejo	Kuliner Kolang-kaling dan <i>River Tubing</i>
Gunung Pati	Kandri	Wisata Perahu
Gunung Pati	Nongkosawit	Omah Pang
Mijen	Kedungpane	Curug Gondoriyo
Mijen	Wonolopo	Edukasi Bahasa Inggris
Tugurejo	Tugurejo	Mangrove

Sumber : Website SiKenang Kota Semarang

Kota Semarang saat ini memiliki 7 desa wisata dengan beragam potensi yang berbeda. Desa Jatirejo dengan potensi kuliner kolang-kaling menjadi salah satu desa wisata yang sangat potensial untuk

dikembangkan. Hal ini karena Jatirejo memiliki keunggulan sebagai sentra kolang-kaling terbesar di Semarang. Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo dilandasi oleh regulasi yaitu Surat Keputusan Walikota Semarang No. 556/819 tahun 2017 tentang Penetapan Desa Wisata Kota Semarang. Desa Jatirejo juga memiliki kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yaitu Pokdarwis Jatilanggeng. Pengembangan desa wisata Jatirejo dinaungi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (Maulina & Suheri, 2020).

Desa Jatirejo menawarkan empat daya tarik wisata yaitu eduwisata pengelolaan kolang kaling dan produk kolang-kaling, GFF (Green Fresh Farm) atau eduwisata perah susu sapi dan penjualan produk olahan susu, Kajera (Kampung Jahe Merah) yaitu eduwisata penanaman jahe merah, dan Kambera (Kampung Cabai Merah) yaitu eduwisata penanaman cabai merah.

Desa wisata Jatirejo didirikan sejak 2017, namun sampai saat ini desa ini masih menjadi desa wisata rintisan di Semarang. Dalam pengembangannya, belum ada peningkatan yang maksimal. Hal ini dianggap sebagai suatu permasalahan karena letak desa wisata Jatirejo berdekatan dengan beragam wisata lain seperti Desa Wisata Kandri yang terbilang

maju, namun dengan potensi wisata yang hampir sama, Jatirejo bahkan masih menjadi desa wisata rintisan (Gunawan, Sari, et al., 2022).

Pengembangan daya tarik di desa Jatirejo ini masih menemui berbagai permasalahan. Mengutip penelitian mengenai pengembangan desa wisata jatirejo oleh (Jannata et al., 2023) menyatakan bahwa belum optimalnya pengelolaan desa wisata disebabkan karena lemahnya koordinasi antar stakeholders pariwisata. Penelitian yang dilakukan oleh (D. P. Putri & Suminar, 2023) mengenai pemberdayaan masyarakat di desa wisata Jatirejo terlihat bahwa semakin bertambahnya tahun, pengelolaan desa wisata dengan daya tarik kolang kaling, jahe merah dan cabe merah dapat dikatakan belum optimal dan masih perlu mendapat perhatian lebih bagi pemerintah maupun stakeholders lain. Ketidakefektifan ini menyebabkan jumlah wisatawan Jatirejo yang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan.

Tabel 1.3

Jumlah Kunjungan Jatirejo

Tahun	Bulan	Jumlah Kunjungan
2022	Desember	114
2023	Januari	130
2023	Februari	39

Sumber: Data Penelitian Terdahulu oleh (D. P. Putri & Suminar, 2023)

Promosi di desa wisata Jatirejo juga terbilang belum optimal. Pihak pengelola Jatirejo memang sudah memiliki sosial media untuk ajang promosi, namun belum dimanfaatkan dengan baik karena mereka tidak aktif melakukan promosi. Selain permasalahan promosi sosial media yang kurang, Desa Jatirejo juga tidak aktif dalam melakukan promosi di website desa wisata atau “jadesta” yang disediakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupa platform pendataan profil dan analisis penentuan klasifikasi desa wisata. Hal ini sangat disayangkan mengingat website ini kerap digunakan wisatawan untuk melihat potensi desa wisata di berbagai daerah di Indonesia. Ketidaktifan media promosi ini berpengaruh pada produk desa wisata Jatirejo yang kurang dilirik oleh masyarakat (Admindesa, 2023).

Permasalahan serupa mengenai SDM ini juga terbukti melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jannata et al., 2023) yang mendapatkan hasil bahwa belum optimalnya pengelolaan Desa Wisata Jatirejo berasal dari indikator sumber daya manusia yaitu masyarakatnya sendiri yang memang kurang minat dan keseriusan untuk mengelola pariwisata, akibatnya pariwisata di Jatirejo kurang terintegrasi dan terkesan individualis. Unsur kesatuan masyarakat dibawah

pokdarwis terbilang kurang. Komoditas lain yang ada di Jatirejo adalah banyaknya tumbuhan pisang yang kurang dimanfaatkan dengan maksimal karena tidak dijadikan tanaman pisang yang berkualitas untuk dijual (Mariana et al., 2022).

Berangkat dari permasalahan ini, peneliti kemudian ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang evaluasi pelaksanaan program pengembangan desa wisata Jatirejo. Desa wisata ini perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab ketidakefektifan pengelolaan dan pelaksanaannya. Penelitian tentang evaluasi pelaksanaan ini juga diharapkan dapat menemukan faktor penghambat dari pelaksanaan pengembangan desa wisata Jatirejo Kecamatan Gunungpati. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata Jatirejo Kecamatan Gunungpati”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo di Kecamatan Gunungpati?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo di Kecamatan Gunungpati?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Jatirejo di Kecamatan Gunungpati
2. Menganalisis faktor penghambat program pengembangan Desa Wisata Jatirejo di Kecamatan Gunungpati

KAJIAN TEORI

1. Administrasi Publik

Definisi administrasi publik menurut Chandler dan Plano (Ade Haryuningsih dkk, 2021) merupakan proses organisir dan koordinasi pada sumberdaya dan personal publik dengan tujuan menciptakan formulasi, implementasi serta pengelolaan keputusan-keputusan dalam suatu kebijakan publik. Definisi lain disampaikan oleh Woodrow Wilson bahwa administrasi publik adalah praktik urusan pemerintah untuk melaksanakan pekerjaannya dengan efisien sesuai harapan masyarakat (Kadir, 31 2020). Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta mengatasi permasalahan negara dengan pengelolaan organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.

2. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik memiliki kaitan erat dengan pemerintahan dan para

elit birokrasi yang berurusan dengan publik. Definisi kebijakan publik menurut Gerston adalah usaha yang dilakukan pemerintah guna menyelesaikan masalah publik (Muchtarom et al., 2023). Presman dan Wildavsky dalam (Muchtarom et al., 2023) juga menyatakan pandangannya mengenai kebijakan publik bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan sebuah hipotesis, artinya kebijakan mengandung gambaran kondisi awal serta ramalan dari akibat yang akan dirasakan setelah adanya kebijakan. Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan pemerintah yang dibuat untuk mengatasi adanya permasalahan tertentu, merealisasikan kegiatan tertentu dan alat pencapaian tujuan tertentu yang dijalankan melalui lembaga pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program adalah pemberian penilaian terhadap suatu program. Penilaian ini dilakukan untuk memberikan umpan balik agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan efektif dan efisien (Asri et al., 2021). Menurut Prijambodo dalam (Asri et al., 2021), evaluasi pelaksanaan atau monitoring ini dilakukan dengan mengamati pelaksanaan program dan mengidentifikasi ada tidaknya

kesalahan dalam pelaksanaan tersebut, sehingga kesalahan yang ditemukan dapat diperbaiki dan upaya penanggulangan yang tepat dapat ditetapkan sedini mungkin. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati dan mendapat gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan suatu program.

4. Kriteria Evaluasi Pelaksanaan Program

Menurut Bridgman dan Davis dalam (Agustina, 2022) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi pelaksanaan program meliputi :

a. Input

Input menfokuskan pada penilaian tentang sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Indikator ini bisa meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lain. Input dalam penelitian ini memfokuskan penilaian pada penggunaan sumberdaya yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan desa wisata Jatirejo sehingga tujuan program bisa tercapai.

b. Proses

Proses berkaitan dengan penilaian bagaimana program ini ditransformasikan ke dalam suatu pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek

metode pengembangan desa wisata. Indikator 47 proses dalam penelitian ini melihat bagaimana metode dan transformasi pengembangan program desa wisata serta efektivitas dan efisiensi dari proses pengembangan desa wisata Jatirejo.

c. Output

Output menfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Dalam indikator ini terdapat catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Indikator output dalam penelitian ini melihat bagaimana hasil yang diperoleh dari pengembangan desa wisata Jatirejo.

d. Outcome

Outcome ini berfokus menilai tentang dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkait dengan kebijakan. Indikator outcome dalam penelitian ini berkaitan dengan dampak yang diterima masyarakat dengan adanya program pengembangan desa wisata di Jatirejo baik dampak positif maupun negatif.

Ketika suatu program atau kebijakan dijalankan, penting untuk memastikan keterkaitan antara konsep input, proses, output dan outcoma. Hal ini karena keempat elemen ini berdampak pada keberhasilan program.

5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program

Faktor penghambat merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi melambatnya kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Menurut Darwin (Arifin, 2020) terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program.

a. Kepentingan

Kepentingan ini berkaitan dengan adanya konflik dari kelompok masyarakat tertentu karena muncul golongan masyarakat pro dan kontra. Kepentingan ini membawa dampak negatif yang berasal dari kelompok masyarakat yang merasa dirugikan yang pada akhirnya menghambat keberjalannya program. Semakin besar konflik kepentingan terjadi dalam pelaksanaan suatu program, maka semakin sulit pula program tersebut untuk dilaksanakan.

b. Azas Manfaat

Azas manfaat berkaitan dengan manfaat adanya program bagi kelompok sasaran. Setiap program yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan setiap persoalan masyarakat dan memberi manfaat positif bagi masyarakat. Apabila sebuah program manfaatnya berhasil dirasakan oleh masyarakat, maka dengan sendiri proses pelaksanaan tersebut akan lebih mudah,

sebaliknya jika program kurang memberikan manfaat bagi kelompok sasaran, maka pelaksanaannya cenderung lebih sulit.

c. Budaya

Budaya disini berkaitan dengan perubahan perilaku kelompok sasaran sebelum dan sesudah adanya program. Ketika sebuah program baru dijalankan, maka terjadi perubahan dalam hal finansial, cara, tempat, perilaku dll. Perubahan ini harus diperhatikan agar perubahan yang terjadi di awal pelaksanaan tidak menimbulkan perlawanan tertentu dari kelompok sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pemilihan secara purposive berarti mempertimbangan informan sesuai kaitannya dengan topik dan kemampuan dalam memahami topik terkait. Data kemudian dianalisis dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan penyajian dan pembahasan data yang relevan dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Wisata Jarirejo

Evaluasi pada program desa wisata dilakukan untuk mendapatkan informasi pengembangan desa wisata, tidak hanya informasi seperti sumberdaya berupa input dan output, namun juga manfaat, hasil, dampak dan faktor yang berpengaruh dalam pengembangan suatu program dalam bidang kepariwisataan (Tarnando, 2021). Pelaksanaan program ini dinilai dengan acuan indikator dari teori evaluasi program menurut Brigman and Davis (2000) sebagai berikut :

1. Input

1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan desa wisata, sehingga keberhasilan pelaksanaannya tergantung pada kualitas sumber daya manusia (Brigman and Dawis dalam Agustina, 2022). Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan desa wisata Jatirejo dari pengelola harian maupun masyarakat lokal belum terbilang optimal. Kecukupan dan kompetensi SDM penyelenggara program masih kurang.

Pengelola desa wisata Jatirejo ini masih belum menjalankan tugasnya dengan maksimal yang diakibatkan perbedaan prioritas dan kesibukan antar pengelola, sehingga rapat rutin jarang

dilakukan. Pengelola juga belum menemukan teknik yang tepat untuk mempromosikan produk wisatanya agar lebih dikenal masyarakat luas. Dalam artian kemampuan mereka mengenai kepariwisataan masih kurang. Sedangkan dari sisi masyarakat lokal, kesiapan menjadi pelaku wisata masih kurang, mereka cenderung kurang bersedia terlibat karena merasa tidak mendapatkan keuntungan dari adanya program.

1.2 Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang memadai mendukung keberjalanan desa wisata dengan maksimal. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah pembangunan sarana prasarana serta fasilitas penunjang desa wisata merupakan kewajiban dari pemerintah daerah dan pemerintah kota. Sarana dan prasarana di Desa Wisata Jatirejo ini sudah cukup lengkap untuk keempat daya tarik wisata, namun wisata jahe merah menjadi daya tarik paling kurang karena sifatnya menyesuaikan musim dan pengelola yang kurang aktif. Pemkot Semarang telah menyediakan pembangunan sarana dan fasilitas di Jatirejo, namun belum secara keseluruhan. Fasilitas yang diberikan biasanya perbaikan infrastruktur umum (perbaikan jalan) dan fasilitas peningkatan

motivasi seperti pelatihan atau sosialisasi. Namun untuk alat-alat dan dana produksi mayoritas didapatkan bukan dari Pemerintah Kota Semarang, namun dari CSR dan kas masyarakat pribadi.

1.3 Anggaran

Anggaran memastikan ketersediaan sumberdaya finansial yang teralokasikan sesuai dengan tujuan program. Sesuai regulasi, Jatirejo sudah memiliki anggaran dasar dan manajemen keuangan yang baik. Kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan program sudah dijalankan dengan baik, terbukti dari sering diadakannya rapat evaluasi anggaran. Namun, terdapat masalah mengenai kecukupan anggaran, anggaran yang mereka dapat hanya dari penjualan paket wisata sehingga kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

2. *Process*

Indikator proses melihat bagaimana metode dan transformasi pengembangan program desa wisata dijalankan serta efektivitas dan efisiensi dari metode tersebut (Brigman and Dawis dalam Anggraini et al., 2022).

2.1 Transformasi

Saat Jatirejo ditetapkan menjadi desa wisata, masyarakat menerima adanya transformasi atau perubahan berupa adaptasi berbagai inovasi baru mengenai jenis olahan produk yang mereka jual.

Transformasi pelaksanaan program yang dijalankan sudah sesuai dengan regulasi karena desa wisata dikembangkan dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk kemudian diberi inovasi sehingga menjadi produk wisata, namun terdapat permasalahan seperti adanya kecemburuan sosial antar pengolah UMKM karena keterbatasan alat produksi dan pembagian keuntungan

2.2 Metode

Metode pengenalan program sudah dijalankan sesuai regulasi yaitu melalui sosialisasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata. Metode pelaksanaan program sudah sesuai karena perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata melakukan pengawasan terhadap pengelolaan desa wisata sesuai kewenangannya, namun komunikasi dan koordinasi antar stakeholder belum optimal karena keterbatasan waktu dan prioritas. Meski sudah dijalankan sesuai dengan regulasi, namun metode pengembangan belum terbilang efektif, karena program pelatihan yang diberikan belum bisa terserap dengan baik dan ditindaklanjuti karena hanya dilakukan sekali dua kali. Metode pengembangan juga belum dikatakan efisien dalam aspek pendampingan dan monitoring karena masyarakat merasa pemerintah kurang solutif dan komunikasi masih terbatas,

serta banyaknya SDM seperti pokdarwis dan pengelola membuat pembagian tugas justru kurang jelas dan akhirnya banyak pihak yang tidak aktif.

3. Output

Output merupakan indikator penilaian program yang memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau pelaksanaan program (Brigman dan Davis dalam Anggraini et al., 2022)

3.1 Produk Wisata

Jatirejo memiliki katalog yang menyediakan 4 paket wisata yang mereka tawarkan dengan daya tarik yang berbeda-beda. Ketiga produk wisata yaitu GFF, Koling dan Kampera berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat karena adanya inovasi sehingga produk menarik, namun untuk Kajera masih kurang karena keterbatasan musim, kemampuan pengelola dan keaktifan pengelola.

3.2 Perubahan Fasilitas

Perbaikan fasilitas desa termasuk dalam output pembangunan desa wisata, Menurut Peraturan Gubernur No 53 tahun 2019 pemerintah harus melakukan fasilitasi mutu produk wisata pedesaan dengan melakukan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Perbaikan fasilitas memang menjadi salah satu output yang diterima sejak Jatirejo ditetapkan menjadi desa wisata. Namun

perbaikan tersebut dilakukan pada fasilitas umum seperti jalan, lampu dan selokan, sedangkan untuk fasilitas yang ditujukan khusus desa wisata terbilang kurang.

4. Outcomes

Outcome merupakan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan (Brigman and Davis dalam Anggraini et al., 2022). Outcome pada penelitian ini berkaitan dengan dampak yang diterima masyarakat Jatirejo dengan adanya program pengembangan desa wisata.

Indikator outcome terbilang optimal karena masyarakat lebih banyak merasakan dampak positif daripada negatif dengan adanya program. Program desa wisata membawa dampak positif yang dirasakan oleh kelompok sasaran seperti perubahan fasilitas umum menjadi lebih baik dan Jatirejo yang lebih dikenal masyarakat. Terdapat dampak negatif yang ditemui pada awal pelaksanaan seperti persaingan dan kecemburuan antar pengelola yang disebabkan oleh beberapa pihak yang tidak menerima kesempatan yang sama seperti penggunaan alat produksi, namun masalah ini hanya sesekali ditemui dan sifatnya tidak jangka panjang serta bisa dengan mudah diatasi oleh pengelola dan masyarakat.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Desa Wisata Jatirejo

1. Kepentingan

Kepentingan menjadi salah satu faktor penting ketika suatu program dilaksanakan. Semakin besar konflik kepentingan yang muncul dalam pelaksanaan program, maka semakin sulit proses pelaksanaannya dan sebaliknya (Darwin dalam Latif et al., 2022).

Indikator aspek kepentingan menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan desa wisata Jatirejo. Indikator kepentingan dinilai dengan dua aspek yaitu perbedaan kepentingan dan perbedaan pemahaman masyarakat. Aspek perbedaan pemahaman tidak menghambat program, namun aspek kepentingan menghambat program. Hal ini karena terdapat permasalahan dalam aspek kepentingan, adanya konflik kepentingan dan perbedaan prioritas antara Kelurahan dan pengelola membuat beberapa pihak kurang puas dengan keputusan yang diambil. Masyarakat merasa kepentingannya kurang diprioritaskan, yang akibatnya berdampak pada penurunan motivasi masyarakat dalam pengelolaan program.

2. Azas Manfaat

Menurut Darwin (Latif et al., 2022) program akan terlaksana dengan baik jika memberikan manfaat yang baik bagi

masyarakat, apabila manfaat kurang dirasakan maka pelaksanaan program akan sulit dilakukan. Azas manfaat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program desa wisata di Jatirejo. Terdapat permasalahan pada aspek manfaat program serta kemampuan program dalam penyelesaian masalah.

Adanya desa wisata diharapkan memberikan manfaat masyarakat sehingga keberjalanan program akan berlanjut, namun manfaat program justru kurang dirasakan, keuntungan finansial hanya dirasakan oleh pengelola UMKM mandiri dengan hasil yang minim. Dalam aspek penyelesaian masalah, program tidak memberikan dampak pada perekonomian, karena penjualan produk dengan keuntungan sangat rendah dengan jumlah kunjungan yang tidak stabil. Akibatnya, masyarakat enggan terlibat pelaksanaan program dan memilih fokus pada urusan masing-masing.

3. Budaya

Menurut Darwin (dalam Latif et al., 2022) semakin banyak perubahan yang perlu disesuaikan dalam pelaksanaan program, makin tinggi pula resiko kegagalan dalam pelaksanaannya, sedangkan makin minim perubahan yang dialami kelompok sasaran, potensi program diterima dengan baik akan semakin besar.

Budaya tidak menjadi faktor penghambat pada pelaksanaan desa wisata di Jatirejo. Masyarakat merasa tidak menerima perubahan kebiasaan maupun nilai dan norma saat Jatirejo menjadi desa wisata. Artinya, adanya desa wisata tidak memberikan pengaruh atau perubahan pada budaya dan nilai norma masyarakat Jatirejo, sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya tidak menjadi faktor penghambat pengembangan desa wisata Jatirejo.

4. Faktor Penghambat Lain

Faktor penghambat lainnya merupakan faktor penghambat yang muncul berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan. Sumber daya alam menjadi faktor penghambat yang peneliti temukan. Sumber daya alam ini berkaitan dengan tidak adanya wisata alam menarik di Jatirejo, paket yang ditawarkan hanyalah wisata edukasi. Akibatnya, Jatirejo cenderung kurang menarik di mata pengunjung dan konsumennya terbatas. Hal ini bisa menjadi penghambat karena tanpa adanya objek wisata alam atau bangunan yang menarik, desa tersebut mungkin kesulitan untuk mengembangkan paket wisata yang dapat menarik pengunjung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, evaluasi

pelaksanaan program pengembangan desa wisata Jatirejo secara keseluruhan belum optimal karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Penilaian didasarkan pada empat indikator evaluasi program menurut Brigman and Davis (2000), indikator *outcome* terbilang optimal, namun masih ditemukan permasalahan pada ketiga indikator *input*, *proses*, *output*, yang dijabarkan sebagai berikut :

A. Input

Aspek sumberdaya manusia dan anggaran belum optimal sedangkan sarana prasarana terbilang cukup namun masih perlu perbaikan

B. Process

Aspek metode dan transformasi yang dijalankan belum efektif dan efisien karena belum terealisasikan sesuai tujuan, penggunaan sumberdaya yang kurang tepat dan masih mengalami permasalahan.

C. Output

Aspek produk wisata memberikan kepuasan namun aspek perbaikan fasilitas khusus desa wisata yang diterima masih dirasa kurang

D. Outcome

Indikator ini dikatakan optimal karena banyak dampak positif yang dirasakan setelah adanya program, sedangkan dampak negatif sangat minim dan sudah berhasil teratasi dengan baik

Faktor Penghambat pelaksanaan program desa wisata Jatirejo dinilai dengan tiga indikator penghambat pelaksanaan program menurut Darwin (1999), indikator kepentingan dan azas manfaat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program desa wisata Jatirejo, namun indikator budaya tidak mempengaruhi pelaksanaan program

A. Kepentingan

Azas kepentingan menghambat program. Konflik kepentingan dan perbedaan prioritas menyebabkan motivasi pengelolaan desa wisata menjadi berkurang

B. Azas Manfaat

Azas manfaat menghambat pelaksanaan program. Minimnya manfaat dari adanya program menyebabkan pelaksanaan terhambat karena masyarakat enggan dilibatkan dalam menjalankan program.

C. Budaya

Budaya tidak menghambat pelaksanaan program. Tidak ada perubahan kebiasaan dan nilai norma oleh masyarakat sehingga aspek budaya tidak berpengaruh pada pelaksanaan program

D. Faktor Penghambat Lain

Sumber daya alam menghambat pelaksanaan program. Tidak adanya sumber daya alam yang menarik, menyebabkan Jatirejo cenderung kurang dilirik dan jumlah pengunjung terbatas.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan :

1. Sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pengembangan desa wisata Jatirejo agar berjalan optimal
 - a. Dinas Pariwisata perlu meningkatkan intensitas monitoring dan kunjungan pada desa wisata Jatirejo, kekurangan atau masalah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi
 - b. Menggandeng desa wisata lain sebagai sarana promosi dan marketing, hal ini dilakukan agar desa wisata Jatirejo lebih dikenal oleh masyarakat luas
 - c. Desa Jatirejo perlu berpartisipasi dalam event dan pameran desa wisata, bertujuan agar Jatirejo bisa lebih dikenal dengan ikut serta dalam event pariwisata daerah maupun nasional
2. Sebagai upaya perbaikan faktor penghambat
 - a. Melakukan rapat rutin dalam periode waktu tertentu untuk mengidentifikasi kepentingan berbagai pihak yang terlibat, sehingga dapat lebih mudah menemukan titik temu dan solusi yang saling menguntungkan.

- b. Memanfaatkan budaya sebagai produk wisata misalnya dengan pertunjukan seni atau budaya yang dipadukan dengan paket-paket wisata lain sehingga lebih menarik bagi pengunjung

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., Alawiyah, T., Apriansysh, G., Abdullah, R., & Afgani, M. W. (2021). Survey Design: Cross Sectional Dalam Penelitian Kualitatif Muhammad. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 5(1), 31–38. <https://doi.org/10.22437/jiituj.v5i1.12886>
- Achmad, F. (2023). Peran Inovasi Dalam Meningkatkan Kinerja Industri Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(03), 150–157. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i03.244>
- Ade Haryuningsih Dkk. (2021). Pengaruh Kompensasi Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i2.2909.g1350>
- Admindesa. (2023). Strategi Promosi Dan Pemasaran Desa Wisata: Membawa Keajaiban Kepada Wisatawan. *Bhuanajaya.Desa.Id*. <https://www.bhuanajaya.desa.id/Strategi-Promosi-Dan-Pemasaran-Desa-Wisata-Membawa-Keajaiban-Kepada-Wisatawan/>
- Agustina, D. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Mojokerto
- Alia Akhmad, K. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(6), 173–181. <https://www.jurnalintelektiva.com/Index.Php/Jurnal/Article/View/419>
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Anggraini, W., Roeliana, L., & Suratman, S. (2022). Evaluasi Program E-Warong Kube Pkh Berdasarkan Permensos Ri Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bengkulu (Studi Pada Kecamatan Muara Bangkahulu). *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik*, 6(1), 1120. <https://doi.org/10.33369/jgoap.v6i1.21412>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arifin, J. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Dilihat Dari Aspek Komunikasi Pada Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten 173
- Tabalog. *Japb*, 3(2014), 2020.

- Asari, A., Zulkarnaini, Hartatik, & Anam, A. C. (2023). Pengantar Statistika.
- Asih, R. (2023). Evaluasi Program Kerja Pondok Pesantren Al Falah Margodadi Kabupaten Tanggamus. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/23065/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/23065/)
- Asri, N. W. S., Purnaweni, H., & Subowo, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bank Sampah Di Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. (Doctoral Dissertation, Faculty Of Social And Political Science), 13(1), 104–116. <https://Eprints2.Undip.Ac.Id/Id/Eprint/10851/%0Ahttps://Eprints2.Undip.Ac.Id/Id/Eprint/10851/2/BA B I.Pdf>
- Bahri, A. F., Siregar, S. K., Nur, R., & Lidani, A. (2022). Evaluasi Program Pendidikan (C. Wijaya & N. K. Daulay (Eds.)). Umsu Press. <https://Books.Google.Co.Id/Books?hl=Id&lr=&id=F3t8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT19&dq=Sedangkan+Definisi+Evaluasi+Program+Menurut+Tyler+Dalam+Bukunya+Suharsimi+Arikunto+Mengatakan+Bahwa+Evaluasi+Program+Adalah+Proses+Untuk+Mengetahui+Suatu+Keberhasilan+Pendidikan>
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2022). Implementasi Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda Bravelly. NBER Working Papers, VIII(1), 18–25. [Http://Www.Nber.Org/Papers/W16019](http://Www.Nber.Org/Papers/W16019)
- Elsa Monika, & Nur Laila Meilani. (2023). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 2(4), 245–256 <https://Doi.Org/10.55606/Jhps.V2i4.2723>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, 21(1), 33–54. <https://Doi.Org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Fathir Ramadhan, D. (2023). Pengaruh Ketepatan Anggaran, Kecukupan Anggaran, Dan Sasaran Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kinerja Pembiayaan Sekolah (Studi Kasus Pada SMA/SMK Negeri Dan Swasta Di Kota Sukabumi Tahun [Http://Localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/48912020](http://Localhost:8080/Xmlui/Handle/123456789/48912020)).
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Publik Policy By William Dunn : Analysis And Implementation. Journal Of Humanities And Social Studies, <https://Humasjournal.My.Id/Index.Php/J/Article/View/3>
- Gayatri, N. A. P., Warsono, H., & Santoso, S. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 408–420. <https://Digilib.Unila.Ac.Id/72833/>
- Giantara, F., & Amiliya, R. (2021). Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Bagian Dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis). 11, 86–96. 174
- Gunawan, W. Ben, Febriyanti, M. S., & Sari, D. K. (2022). Diversifikasi Dan Inovasi Produk Berbahan Dasar Kolang- Kaling Di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Pengabdian. 3(2), 74–84.
- Gunawan, W. Ben, Sari, D. K., & Nashera, A. (2022). Diversifikasi Dan Inovasi Produk Berbahan Dasar

- Kolang-Kaling Di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *SEMANGGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 111–123. <https://doi.org/10.38156/Sjpm.V1i02.128>
- Guntur, A. C. N. & M. (2021). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 1–23.
- Hala, F. S., Ayu, S. P., & Kleden, M. (2024). Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Melalui Pendekatan Teori George Edward Lippitt Di Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. *Studi Humaniora Interdisipliner*, 8(November), 65–73.
- Hamdan Ridwan, E. (2023). Pesantren Dan Madrasah Hasil Rihlah Ilmiah Intelektual Muslim Ke Timur Tengah. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 1530–1545. <https://doi.org/10.37274/Rais.V7i3.865>
- Haniyuhana, A., & Katerina Bataha. (2022). Evaluasi Kebijakan Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Di Sd Negeri Tumbrep 01. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(2), 53–66. <https://doi.org/10.21009/Jpd.V13i2.28385>
- Ikeanyibe, O. M., Eze Ori, O., & Okoye, A. E. (2017). Governance Paradigm In Public Administration And The Dilemma Of National Question In Nigeria. *Cogent Social Sciences*, <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1316916>
- Immanuel Jaya. (2021). Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 3(1),
- H., & Socdarto, S. H. (2023). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Jatirejo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. 1–15.
- Kadir, A. (2020). Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia. In *Dharma Persada*.
- Lailatul Mufidah, K. T. (2021). Pelaksanaan Evaluasi Program Tahfiz Siswa MTSN 6 Nganjuk Selama Pandemi Covid-19 Tahun Ajaran 2020/2021. 7(3), 6.
- Latif, I. J., Idami, Z., & Mukhirjal. (2022). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 7, Nomor 1, Februari 2022* www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP 7(1), 1–20
- Ma'ruf, Sahlania, O., Ashariyana, & Mana, R. (2023). Implementasi Pelayanan Kendaraan Publik Berbasis Aplikasi Laika Di Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Ilmiah Administrasi, <https://doi.org/10.47030/Administrasita.V14i1.48414>.
- Mariana, N., Saefurrohman, S., U. N., D. H., & Utomo, A. P. (2022). Mindset Sadar Wisata Dalam Tatanan Kehidupan Baru Yang Produktif Dan Berdaya Guna Menuju Kemandirian Masyarakat Bagi Penggerak Deswita Jatirejo Gunungpati. *Ikra-Ith Abdimas*, 6(1), 210–219. <https://doi.org/10.37817/IkraIthabdimas.V6i1.2396>